

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak sekali perubahan teori dalam hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya isu-isu baru seperti isu kemanusiaan, konflik etnis, politik lingkungan global, dan masa depan negara-bangsa. Masalah kemanusiaan telah menyebar ke seluruh dunia di setiap negara yang mengalami konflik. Isu yang paling dominan adalah diskriminasi, pemerkosaan, pelanggaran, atau penculikan perempuan dan anak.

Anak-anak telah menjadi perhatian besar bersama dengan konflik yang tidak pernah berakhir yang muncul di dunia. Anak-anak sering terlibat dalam konflik terutama sebagai kombatan. Dalam fenomena konflik, anak-anak termarginalkan dan berpotensi menjadi mesin perang. Apalagi pemikiran anak mudah dipengaruhi. Anak-anak direkrut, dilatih, dan digunakan dalam pertempuran dan pekerjaan non-tempur; Biasanya tidak hanya dilakukan oleh kelompok pemberontak tetapi juga pemerintah (C. S. International, Child Soldiers Global Report 2004 - Guinea 2004). Menurut UNICEF, lebih dari 300.000 anak di bawah 18 tahun setiap tahun dipekerjakan dan dieksploitasi oleh 72 tentara pemerintah dan tentara non-pemerintah di dunia (UNICEF, Adult Wars, Child Soldiers 2002).

UNICEF adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak. UNICEF yang lebih dikenal dengan United Nations Children Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional pertama yang dibentuk untuk merawat anak-anak di dunia. UNICEF didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNICEF berkantor pusat di New York dan bekerja untuk 190 negara di dunia. Dimulai pada masa pasca perang (World War

II) UNICEF memperhatikan kebutuhan darurat anak; makanan, pakaian, dan kebutuhan kesehatan. Ia telah menjadi bagian permanen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1953 dan memiliki mandat untuk memulai kampanye global yang sukses terhadap penyebaran penyakit yang menyerang jutaan anak (UNICEF, UNICEF Annual Report 2015).

Di era saat ini, UNICEF memiliki posisi terkemuka yang bekerja secara global untuk hak dan kesejahteraan anak. Sidang Umum PBB juga mengadopsi Deklarasi Hak Anak yang menekankan pada perlindungan hak anak, pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, gizi yang baik, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan. Program UNICEF lebih difokuskan pada anak-anak yang paling tidak beruntung. Termasuk penyandang disabilitas, yang terkena dampak urbanisasi besar-besaran, yang terserang penyakit, degradasi lingkungan dan yang terlibat konflik.

Fenomena ini sering terjadi di negara-negara konflik seperti di Benua Asia. Salah satu negara yang pernah mengalami konflik bersenjata yang lama adalah Yaman. Salah satunya fenomena perang saudara yang terjadi di Yaman.

Fenomena *Arab Spring* pada tahun 2011 menjadi awal mula konflik di Yaman. Arab Spring merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM besar yang terjadi di negara-negara Arab. Tahun 2011 merupakan tahun tanpa preseden bagi masyarakat Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara, di mana jutaan orang dari segala usia dan latar belakang membanjiri jalanan-jalanan untuk menuntut perubahan (A. International, MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: YEAR OF REBELLION: THE STATE OF HUMAN RIGHTS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 2012).

Awal mula konflik Yaman terjadi pada Januari 2011 ketika Presiden Ali Abdullah Saleh mencoba mengubah konstitusi sehingga ia dapat tetap berkuasa seumur hidup. Terjadi setelah berbulan-bulan kekacauan politik di mana pasukan pemerintah membunuh ratusan demonstran. Dalam sebuah acara pada tanggal 18 Maret 2011 yang dikenal sebagai "Friday of Dignity"<sup>1</sup>, sekitar 50 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka di Sana'a setelah orang-orang bersenjata, termasuk penembak jitu yang ditempatkan di puncak gedung-gedung di sekitarnya, menembaki demonstran yang damai (A. International, Yemen after the 'Arab Spring': An overview 2016).

---

<sup>1</sup> Sebuah aksi pembantaian yang terbukti menjadi serangan paling mematikan terhadap demonstran pemberontakan Yaman selama setahun. (<https://www.hrw.org/report/2013/02/12/unpunished-massacre/yemens-failed-response-friday-dignity-killings>)

Kemudian, pada Maret 2015, ketika akhirnya Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dan pemerintahnya terpaksa mengundurkan diri karena Huthi<sup>2</sup> telah ambil alih kekuasaan di Sana'a, koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi dari setidaknya sepuluh negara Arab memulai serangan udara terhadap Huthis, mengirim pasukan darat, dan memberlakukan blokade udara dan laut.

Pasukan anti-Huthi telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran serius lainnya. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah melakukan serangan udara yang tidak pandang bulu dan tidak proporsional, menargetkan warga sipil, dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Apa yang disebut kelompok bersenjata Negara Islam telah menyerang masjid-masjid Syiah, membunuh warga sipil.

Pasukan Huthi juga telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penembakan tanpa pandang bulu terhadap wilayah sipil, serangan terhadap rumah sakit dan pekerja medis, dan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjung rasa. Mereka juga telah menculik dan menyiksa orang-orang yang menentang mereka (A. International, Yemen after the 'Arab Spring': An overview 2016).

Pada tahun 2015 Yaman ditetapkan menjadi negara termiskin di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara jauh sebelum konflik pecah. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan bahwa Yaman kini menderita krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Pertempuran telah menghancurkan ekonomi negara itu, menghancurkan

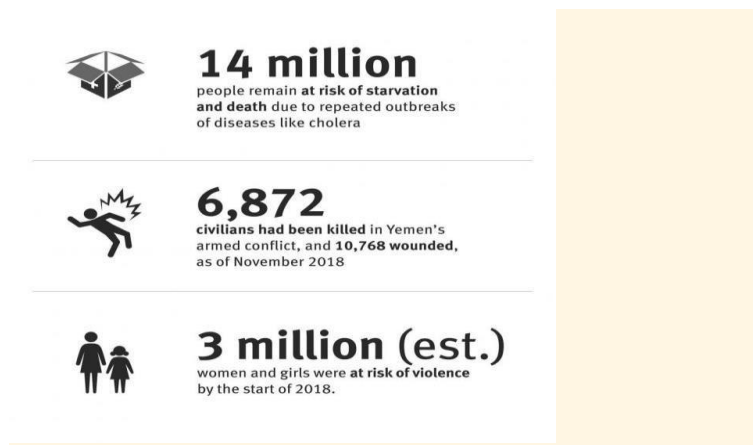
---

<sup>2</sup> Houthi adalah kelompok pemberontak yang telah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Yaman sejak puluhan tahun lalu. (<https://www.liputan6.com/global/read/3988899/siapa-houthi-yang-merudal-bandara-abha-dan-perangi-koalisi-saudi-di-yaman>)

infrastruktur kritis, dan menyebabkan kerawanan pangan semakin dekat dengan kelaparan (Bank 2019). Warga sipil menanggung beban terbesar dari kekerasan di Yaman. Selain menyebabkan kematian dan luka-luka ribuan warga sipil, pihak-pihak yang terlibat konflik telah memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah akibat dari tahun-tahun kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa (A. International, *Civilians' Struggle for Survival* 2019).

Sebanyak 22 juta orang Yaman saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Menurut UNICEF<sup>3</sup>, konflik telah menyebabkan 1 juta pekerja di sektor publik tanpa upah selama dua tahun, dan organisasi memperkirakan bahwa 12 juta orang Yaman termasuk anak-anak akan bergantung pada bantuan makanan pada tahun 2019 (A. International, *Civilians' Struggle for Survival* 2019).

**Figure 1 The Effect of War**



<sup>3</sup> *The United Nations Children's Fund* awalnya dikenal sebagai *the United Nations International Children's Emergency Fund* dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946, untuk menyediakan makanan darurat dan perawatan kesehatan bagi anak-anak dan ibu-ibu di negara-negara yang telah hancur akibat Perang Dunia II.

Perang yang ada di negara Yaman juga berdampak pada anak-anak, seperti banyak anak-anak yang menderita kelaparan, gizi buruk, putus sekolah bahkan menjadi yatim piatu. Keadaan yang demikian membuat pikiran anak-anak menjadi mudah untuk dipengaruhi dan kelompok Huthi memanfaatkan hal tersebut. Kelompok Huthi merekrut anak-anak dari berbagai wilayah di Yaman untuk dijadikan sebagai tentara dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu atau putus sekolah. Banyaknya anak-anak yang berumur 15 tahun - 16 tahun dengan membawa senjata api dan pistol untuk menjaga pos penjagaan di ibukota Sanaa, Yaman, kemudian mereka juga dibayar USD 2 setiap harinya atau sekitar Rp 26.000 dan diberi makanan (Gupta 2015).

Kelompok Huthi memiliki jumlah tentara sekitar 20.000 anggota - 30.000 anggota yang mana 30% - 40% berusia dibawah 18 tahun sedangkan 15% - 25% dibawah 16 tahun, bahkan ada anak yang direkrut dengan tujuan untuk eksploitasi seksual (Gupta 2015).

Tak hanya itu anak-anak yang ada di sekolah khusus yang belajar mengenai pengenalan agama pun diajarkan mengenai kurikulum yang mengajarkan tentang sejarah perang dunia dan penjelasan mengenai Arab Saudi yang memulai perang dengan orang-orang Yaman. Salah satu anggota keluarga yang adiknya direkrut untuk dijadikan tentara perang menjelaskan bahwa anak-anak sangat suka ketika mereka bisa menembak, membawa pistol dan memakai seragam tentara.

Anak-anak tersebut direkrut dari setiap anggota keluarga. Apabila anak-anak mereka meninggal di medan perang, maka kelompok Huthi akan memberi gaji bulanan dan pistol kepada ayahnya untuk tetap diam, sehingga banyak keluarga yang ketakutan karena jika mereka berbicara atau melapor, kelompok Huthi dapat menyiksa anak-anak yang sudah diambil dari keluarga atau terhadap anak-anak lain bahkan anggota keluarga yang lain.

Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang diambil tetapi keluarganya tidak berani untuk bicara atau menanyakannya karena mereka juga takut ditahan (Sini 2013).

*"Perekrutan anak-anak tumbuh sejak awal perang di Saada pada tahun 2004. Anak-anak didaftar oleh tentara, berbagai suku dan kelompok bersenjata. Pada tahun 2011, ada perekrutan yang jelas oleh semua orang - terutama oleh militer dan suku-suku,"* (Gupta 2015)

Aktivis hak anak Yaman, Omklthom Mohammed Alshami, mengatakan kepada *Al Jazeera*<sup>4</sup>.

Kurangnya akses, ditambah dengan situasi keamanan yang tidak menentu dan ketakutan akan pembalasan di antara penduduk setempat dari kelompok-kelompok bersenjata, telah mempersulit kelompok-kelompok pemantau untuk memberikan angka pasti mengenai jumlah anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman.

*"Jumlah pejuang Houthi lebih realistis mendekati 20.000 hingga 30.000, di mana perkiraan kasar 30 hingga 40 persen di bawah 18, dan 15 hingga 25 persen di bawah 16,"* (Gupta 2015)

kata analis Yaman Hisham al-Omeisy kepada *Al Jazeera*.

Tahun lalu, PBB memverifikasi perekrutan lebih dari 100 anak, beberapa di antaranya berusia enam tahun. Hampir setengah dari mereka dilantik selama

---

<sup>4</sup> Sebuah lembaga penyiaran yang didanai negara Qatar di Doha, Qatar, yang dimiliki oleh Al Jazeera Media Network. (aljazeera.com)

kampanye rekrutmen di masjid-masjid dan pasar oleh kaum Salafi<sup>5</sup> dari provinsi selatan dalam perang melawan orang-orang Huthi.

*"Anda melihatnya ketika Anda berkendara keliling negara atau di Sanaa, anak laki-laki yang sangat muda dengan senjata berjaga di pos-pos pemeriksaan. Itu salah. Anak-anak harus di sekolah,"* (Gupta 2015)

Julien Harneis, perwakilan UNICEF di Yaman, mengatakan kepada *Al Jazeera*.

Tentara anak-anak juga diinisiasi ke dalam konflik regional oleh kelompok-kelompok bersenjata lainnya, seperti al-Qaeda<sup>6</sup> di Semenanjung Arab dan afiliasinya, Ansar Al Sharia, dengan uang dan janji kemuliaan dalam kematian. Sebuah laporan 2013 oleh sekretaris jenderal PBB tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata di Yaman mengatakan ada laporan tentang anak laki-laki yang direkrut oleh Ansar Al Sharia<sup>7</sup> dengan tujuan yang jelas dari eksploitasi seksual. Kasus-kasus ini sebagian besar tidak dilaporkan karena stigma sosial yang melekat padanya. Laporan itu juga menyoroti penggunaan obat-obatan untuk membius anak-anak, mencatat mereka telah dipaksa ke medan perang.

Prospek sumber penghasilan tetap bagi keluarga-keluarga yang dilanda kemiskinan telah menyebabkan banyak anak laki-laki putus sekolah dan bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata ini. Seringkali, mereka bekerja di pos

---

<sup>5</sup> Kelompok yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad dan para sahabat kemudian setelah mereka (murid para sahabat) dan setelahnya (murid dari murid para sahabat).

<sup>6</sup> organisasi militan Islam Sunni militan yang didirikan pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden, Abdullah Azzam, dan beberapa sukarelawan Arab lainnya selama Perang Soviet-Afghanistan yang juga beroperasi sebagai jaringan ekstrimis Islam dan jihadis salafi.

<sup>7</sup> kelompok milisi Islamis Salafi yang mengadvokasi penerapan hukum Syariah yang ketat di Libya yang muncul pada tahun 2011, selama Perang Saudara Libya. Hingga Januari 2015, dipimpin oleh Muhammad al-Zahawi.



pemeriksaan, mengelola dapur atau tertanam sebagai mata-mata. Sebagai negara termiskin di Timur Tengah, dengan 45 persen penduduknya kelaparan setiap hari karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, retribusi keluarga dan rasa maskulinitas dan tugas berbakti yang mendalam, menjadi kontribusi terhadap terjadinya militerisasi anak-anak (Gupta 2015).

Pada bulan Maret 2014, UNICEF meluncurkan kampanye *Anak bukanlah Tentara*<sup>8</sup> untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh pasukan keamanan pemerintah yang berkonflik (UNICEF, Children, Not Soldiers: Yemen Signs Action Plan to End Recruitment and Use of Children by Armed Forces 2014).

Zerrougui, seorang perwakilan khusus dari PBB untuk Anak-anak dan konflik bersenjata menyatakan bahwa,

*“Hari ini, kita selangkah lebih dekat ke dunia di mana tidak ada anak yang digunakan oleh pasukan keamanan dalam konflik,”*

PBB datang ke Yaman dengan harapan akan sebuah janji ketika rencana aksi (*action plan*) akhirnya digerakkan dalam kemitraannya dengan pemerintah Yaman untuk mengakhiri perekrutan anak-anak. Dialog dengan pimpinan Huthi untuk membebaskan tentara anak-anak dan mengintegrasikan mereka kembali ke keluarganya masing-masing sudah dimulai. Namun, mengingat ketidakpastian politik saat ini dan meningkatnya kekerasan nasional, kemajuan di front ini tampaknya

---

<sup>8</sup> sebuah inisiatif dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, dan UNICEF, yang bertujuan untuk menghasilkan konsensus global bahwa tentara anak-anak tidak boleh digunakan dalam konflik (<https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/>)

lemah, mengakibatkan adanya peningkatan perekrutan anak-anak, terutama oleh pasukan Huthi dan milisi lokal lainnya, sementara angkatan bersenjata Yaman terus meminta anak-anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas dan dijelaskan yaitu:

**Bagaimana upaya dari United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menangani kasus tentara anak dalam Perang Yaman?**

### **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menganalisa upaya yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dan menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan satu teori dan konsep. Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu (Mas'ud 1994, 109). Yang pertama adalah konsep tentang Hak Anak dan yang kedua adalah teori tentang Organisasi Internasional.

Penggunaan teori dan konsep tersebut dipilih karena dalam teori peran, dijelaskan mengenai peran apa yang dimainkan oleh organisasi internasional (UNICEF) dalam melakukan perubahan sistem internasional, yang nantinya peran tersebut dapat berupa instrumen, arena maupun aktor. Penggunaan konsep Organisasi Internasional perlu untuk menjelaskan apa landasan/fokus area kebijakan yang dibuat oleh UNICEF untuk mengurangi (mengatasi) kasus tentara anak di dalam perang

Yaman. Sedangkan konsep Hak Anak yang akan menjelaskan mengenai apa saja pelanggaran hak anak yang telah terjadi dalam kasus perang Yaman, dan apa hak yang seharusnya dapat mereka miliki.

### **1. Teori Organisasi Internasional**

Organisasi internasional sebagaimana dikutip dalam *International Organization Third Edition* yang ditulis oleh *Clive Archer*, merupakan suatu bentuk lembaga yang mengacu pada sistem formal aturan dan tujuan, instrumen administrasi yang dirasionalisasi dan yang memiliki 'organisasi teknis dan material formal: konstitusi, bab-bab lokal, peralatan fisik, mesin, emblem, kop surat, staf, hirarki administrasi dan lain sebagainya (Archer, *International organizations third edition* 2001).

Menurut *Margaret P. Karns* dan *Karen A. Mingst* Organisasi internasional sebagai aktor tata kelola global dibagi menjadi (Karns and Mingst 2004):

- a. Inter-Governmental Organizations (IGOs) adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari setidaknya tiga negara bagian yang memiliki kegiatan di beberapa negara bagian. Dan yang anggotanya disatukan oleh perjanjian antar pemerintah formal.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari perseorangan atau perkumpulan yang bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Perusahaan multinasional (MNC) adalah organisasi non-pemerintah tertentu yang bekerja untuk mencari keuntungan melintasi perbatasan.

Berdasarkan *Leorry Bennet* dalam bukunya yang berjudul *International Organizations; Principles and Issues (Edisi Kedua)* menyatakan bahwa organisasi internasional berperan sebagai sarana kerjasama antar negara di bidang untuk mencapai kesepakatan. Ini juga berfungsi sebagai komunikator antar pemerintah untuk mempermudah mengatasi masalah (Bennett 1980).

Melengkapi fungsi di atas, fungsi organisasi internasional menurut *Harold K. Jacobson* dalam bukunya; *Networks of Interdependence: International Organizations and Global Political System* juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori (Jacobson 1979):

- 1) *Fungsi Informasi* melibatkan pengumpulan informasi, analisis, pertukaran, penyebaran data dan sudut pandang.
- 2) *Fungsi Normatif* melibatkan definisi dan deklarasi standar. Bukan sebagai efek mengikat melainkan tentang proklamasi yang mempengaruhi lingkungan tempat berlangsungnya politik domestik dan dunia.
- 3) *Fungsi Penciptaan Aturan* melibatkan definisi dan deklarasi standar menjadi mengikat secara hukum seperti kesepakatan terhadap isu-isu yang ditangani biasanya harus ditandatangani dan diratifikasi oleh aktor terkait.
- 4) *Fungsi Pengawasan* aturan melibatkan pengukuran aturan dari organisasi internasional yang sedang diterapkan.
- 5) *Fungsi Operasional* melibatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi seperti bantuan keuangan dan teknis serta penyebaran pasukan militer.

Menurut W.W Biddle dan L. J. Biddle bahwa peran suatu lembaga internasional dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dapat dibedakan sebagai berikut (Biddle and Biddle 1965) :

1. *Peran sebagai motivator* yang berarti suatu lembaga bertindak untuk memberikan dorongan kepada masyarakat internasional untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
2. *Peran sebagai komunikator*, yang berarti suatu lembaga menyampaikan suatu informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. *Peran sebagai mediator*, yang berarti suatu lembaga menjadi penengah atau pihak yang menjembatani kedua belah pihak dalam membangun hubungan yang baik.

Dalam riset mengenai peranan UNICEF pada tiap penanganan kasus tentara anak di berbagai daerah sebagai komunikator, UNICEF bersama PBB membentuk Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (MRM) yang bertujuan untuk menyediakan pengumpulan sistematis informasi yang akurat, tepat waktu, obyektif dan dapat diandalkan tentang enam pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Sedangkan sebagai motivator, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata dan UNICEF bersama-sama meluncurkan kampanye *Anak, Bukan Tentara*. Kampanye tersebut membuka pintu untuk dialog konstruktif dengan pemerintah dan pihak lain yang berkonflik dalam melindungi anak dan wanita, serta mendorong mereka agar mematuhi standar hak anak internasional.

Perlindungan Anak diinisiasi oleh UNICEF sebagai mediator untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan standar operasional dan kapasitas perlindungan anak dalam angkatan kerja darurat, kegiatan dukungan psikososial, pendidikan risiko ranjau, manajemen kasus dan layanan *Child Protection* kritis seperti pelacakan dan reunifikasi keluarga, reintegrasi sosio-ekonomi, dan lainnya.

## **2. Keamanan Manusia dan Keamanan Anak sebagai Bagian dari Keamanan Manusia**

### ***Keamanan Manusia***

Keamanan manusia di era sekarang bukanlah hal baru dan menjadi lebih kompleks. Ancaman tidak hanya terkonsentrasi pada militer tetapi juga masalah keamanan lainnya yaitu keamanan manusia, keamanan pangan, dan banyak lagi lainnya. Menurut Komisi Keamanan Manusia, definisi Keamanan Manusia adalah:

*“...untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan fundamental - kebebasan yang merupakan inti kehidupan. Ini berarti melindungi orang-orang dari ancaman dan situasi kritis (parah) dan meluas. Artinya menggunakan proses yang dapat membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat. Ini berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang bersama-sama meningkatkan semangat orang-orang untuk bertahan hidup, mencari mata pencaharian, dan meningkatkan martabat.”*

(UNDP 2009)

Keamanan manusia selalu dikaitkan dengan unsur-unsur keamanan, hak dan perkembangan-perkembangan manusia. Berdasarkan United Nations Development Program (UNDP), keamanan manusia terdiri dari konsep atau pendekatan yang saling terkait yang dikategorikan seperti di bawah ini (UNDP 2009):

1) People Centered adalah keamanan manusia yang menempatkan individu sebagai pusat analisis. Ini menganalisis bagaimana martabat individu, kelangsungan hidup, tudung kehidupan dapat terancam.

2) Multi Sektoral memandang keamanan manusia membutuhkan pemahaman yang luas tentang ancaman dan penyebab ketidakamanan dari berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan politik, militer, kesehatan, dan pangan.

3) Sarana yang komprehensif untuk mengatasi masalah keamanan manusia, membutuhkan tanggapan yang kooperatif dan multisektoral yang mempertemukan masalah tersebut.

4) Konteks khusus yang berarti ketidakamanan dapat diubah dalam pengaturan dan solusi yang berbeda terhadap mengatasi masalah.

5) Berorientasi pada pencegahan dalam menangani masalah perlu fokus pada perlindungan dan lingkungan terutama dalam menangani risiko dan penyebab masalah.

UNDP juga membagi jenis sekuritas menjadi; keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan kesehatan, keamanan pribadi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, dan keamanan komunitas.

### ***Keamanan Anak sebagai Bagian dari Keamanan Manusia***

Anak-anak mewakili perhatian khusus pada keamanan manusia. UNICEF mengategorikan ancaman bagi anak-anak menjadi tiga aspek utama (Nesbitt 2005):

Yang pertama adalah *kemiskinan*, sebagai penyebab mendasar tingginya angka kematian dan kesakitan anak terutama di sebagian besar negara berkembang. Anak-anak menderita air bersih, sulit mengakses layanan kesehatan, sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan kekurangan gizi.

Kedua adalah *konflik bersenjata*. Seiring meningkatnya perang, banyak anak dalam kondisi dimana mereka dibesarkan oleh keluarga atau komunitasnya dalam situasi konflik bersenjata. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1990, konflik telah menewaskan sekitar 3,6 juta orang, tragisnya 45 persen di antaranya adalah anak-anak, baik sebagai kombatan maupun non-kombatan. Mereka dianiaya, dieksploitasi, dan mengalami pelecehan seksual.

Ketiga adalah *HIV / AIDS*. Penyakit ini telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang menyebabkan kematian pada banyak orang termasuk anak-anak. Orang yang paling banyak terinfeksi adalah orang yang tinggal di negara berkembang. Khususnya di SubSahara Afrika, HIV / AIDS telah menyebabkan meningkatnya angka kematian anak yang sangat ekstrim dan menurunkan angka harapan hidup anak. Dalam tesis ini, analisis difokuskan pada konflik senjata sebagai potensi ancaman yang memicu anak menjadi kombatan dalam konflik tersebut.



#### D. Hipotesa

UNICEF merupakan aktor independen yang mampu mengupayakan perlindungan dan pencegahan dalam mengatasi masalah perekrutan tentara anak melalui perannya sebagai berikut:

1. UNICEF sebagai *komunikator*; PBB membentuk Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (MRM) yang bertujuan untuk menyediakan pengumpulan sistematis informasi yang akurat, tepat waktu, obyektif dan dapat diandalkan tentang enam pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.
2. UNICEF sebagai *motivator*; meluncurkan kampanye **Anak, Bukan Tentara** untuk memobilisasi perhatian politik, memberikan bantuan teknis, dan mendukung pemerintah yang mengambil langkah-langkah untuk memprofesionalkan pasukan keamanan mereka, hingga membuka pintu untuk dialog konstruktif dengan pemerintah dan pihak lain yang berkonflik dalam melindungi anak dan wanita, serta mendorong mereka agar mematuhi standar hak anak internasional melalui penandatanganan rencana aksi dengan PBB untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak.
3. UNICEF sebagai *mediator*; memberikan respons perlindungan holistik yang dikoordinasikan oleh CP AoR (Child Protection Area of Responsibility, yang inisiasinya bertujuan untuk lebih

mengembangkan atau meningkatkan standar operasional dan kapasitas perlindungan anak dalam angkatan kerja darurat, kegiatan dukungan psikososial, pendidikan risiko ranjau, manajemen kasus dan layanan *Child Protection* kritis seperti pelacakan dan reunifikasi keluarga, reintegrasi sosio-ekonomi, dan lainnya.

Ada pula Dana Kemanusiaan Yaman (YHF) yang tersedia langsung untuk mitra kemanusiaan (CP AoR) yang beroperasi di Yaman. Terdapat beberapa klaster pendanaan utama, diantaranya; Perlindungan dan Pendidikan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menangani kasus keterlibatan anak dalam Perang Yaman.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada upaya yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengurangi dan mengatasi kasus penggunaan anak sebagai tentara di perang Yaman 2014.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini karena perlunya pengamatan subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam

konteks khusus alami, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami (Moleong 1990). Penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah paling penting karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggunakan data sekunder dalam bentuk studi literatur di mana data diambil dari buku, jurnal, situs web resmi, konvensi, laporan resmi dan ilmuwan riset dan media masa yang relevan dengan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

**Bab I** menjelaskan aspek-aspek umum yang terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka kerja teoritis, hipotesis, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan struktur makalah ini.

**Bab II** menjelaskan tentang awal mula pembentukan UNICEF dan bagaimana keterlibatan UNICEF dalam masalah tentara anak.

**Bab III** membahas mengenai Tentara Anak di Yaman.

**Bab IV** berfokus pada bagaimana peran UNICEF mengatasi masalah perekrutan tentara anak dalam perang Yaman dan mengupayakan integrasi kembali korban tentara anak perang Yaman untuk kembali mendapatkan haknya melalui program-programnya.

**Bab V** berisi kesimpulan dari semua penjelasan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.